

Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018

Nita Atika¹, Rani Sofya²

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
Atikanita08@gmail.com¹, ranisofya@fe.unp.ac.id²

Abstract: *This research aims to determine the effectiveness and contribution of local revenues in the city of Bukittinggi in 2011-2018. The type of research used is a descriptive research and using the analysis of contributions and analysis effectiveness. The type of data used was secondary data.*

Based on the research results obtained by the results of 1) the contribution of local taxes is in good criteria with an average of 42.40 percent. The effectiveness municipal tax is on the effective criteria with an average of 98.16 percent. 2) the contribution of regional retribution is in the medium criteria with an average of 29.38 percent. The effectiveness of regional is on the effective criteria with an average of 99.52 percent. 3) contribution of the results of the management of separated regional wealth is in the very poor criteria with an average of 6.06 percent. The effectiveness of the results of the management of the separated regional wealth is in the very effective criteria with an average of 100.65 percent. 4) other legitimate local government revenue contributions local government revenue are in the medium criteria with an average of 22.16 percent. The effectiveness of other legitimate local government revenue is very effective with an average of 120.31 percent. For the future, the local government of Bukittinggi should further optimize the management of the regional wealth separated in order to make a great contribution to the original revenue of the city of Bukittinggi.

Keywords : *local government revenue, effectiveness and contribution*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pengelolaan yang maksimal bagi daerahnya. Dan juga pemerintah daerah diwajibkan untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri melalui penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.

Kota Bukittinggi memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu penerimaan daerah kota Bukittinggi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18. Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing daerah akan berdampak pada kemandirian daerah tersebut. Kemandirian pendanaan daerah, dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan. PAD Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Daerah secara rata-rata masih menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 11,60 persen. Sementara pemberi kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan daerah yaitu berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan dengan rata-rata mencapai 77,10 persen, hal ini terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	45,023,938,692	41,660,125,540	92.53
2012	49,310,208,409	45,262,607,011	91.79
2013	54,646,355,950	55,368,533,089	101.32
2014	60,578,297,922	61,615,347,589	101.71
2015	63,089,666,112	66,029,044,130	104.66
2016	73,665,978,705	71,302,466,356	96.79
2017	76,889,300,509	102,374,322,400	133.15
2018	102,546,700,577	101,937,840,823	99.41

Sumber: Data Diolah 2019

Penerimaan pendapatan asli daerah kota Bukittinggi pada tahun 2011-2018 masih terdapat realisasi pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Dari tahun 2011 hingga 2018 Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target yaitu pada tahun 2013,2014,2015 dan tahun 2017 dengan tingkat pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 133,15% dan tingkat pencapaian terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 91,79%. Penerimaan PAD Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2018 yang tidak melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bukittinggi adalah pada tahun 2011,2012,2016 dan 2018. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah juga harus memberikan peningkatan setiap tahunnya. Menurut Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berikut ini data penerimaan sumber-sumber PAD kota Bukittinggi tahun 2011-2018:

Tabel 2. Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pad Lainnya Yang Sah
2011	17,323,683,897	12,951,894,643	3,234,547,000	8,150,000,000
2012	19,848,460,300	14,935,146,711	2,892,000,000	7,587,000,000
2013	22,561,089,970	16,757,443,119	3,692,000,000	12,358,000,000
2014	27,314,752,524	18,043,486,304	3,453,740,700	12,803,368,061
2015	29,002,326,911	17,032,759,085	3,884,306,585	16,109,651,549
2016	30,709,233,356	21,070,000,000	4,636,233,000	14,887,000,000
2017	38,282,322,400	27,329,000,000	4,953,000,000	31,810,000,000
2018	45,131,000,000	29,943,000,000	4,936,000,000	21,927,000,000

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sedangkan pada sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lainnya masih terdapat penurunan di beberapa tahunnya. Besarnya penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada total penerimaan daerah. Besarnya penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada total penerimaan daerah. Dengan besarnya penerimaan suatu daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memungut penerimaan daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut penerimaan daerah ini dapat dihitung melalui rasio efektivitas. Semua komponen dalam pendapatan asli daerah memiliki peran dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Seberapa besar peran komponen Pendapatan Asli Daerah ini dapat dihitung melalui rasio kontribusi. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis rasio kontribusi dan efektivitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi pada tahun 2011-2018 dan untuk menganalisis efektivitas Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2011-2018.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu berupa data realisasi dan target penerimaan komponen pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dan pendapatan asli daerah kota Bukittinggi tahun 2011-2018. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Bukittinggi dalam Angka, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio kontribusi dan efektivitas. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan komponen pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi dapat dicari dengan membagi realisasi penerimaan komponen PAD dengan realisasi penerimaan PAD dikali 100 persen. Untuk mengetahui kriteria kontribusi komponen pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
Kurang dari 10%	Sangat Kurang
Di atas 10% - 20%	Kurang
Di atas 20% - 30%	Sedang
Di atas 30% - 40%	Cukup
Di atas 40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas antara target dan realisasi komponen pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi dapat dicari dengan membagi realisasi penerimaan komponen PAD dengan target penerimaan komponen PAD dikali 100 persen. Untuk mengetahui kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
Di atas 90% - 100%	Efektif
Di atas 80% - 90%	Cukup Efektif
Di atas 60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2011	17,323,683,897	41,660,125,540	41.58	Baik
2012	19,848,460,300	45,262,607,011	43.85	Baik
2013	22,561,089,970	55,368,533,089	40.75	Baik
2014	27,314,752,524	61,615,347,589	44.33	Baik
2015	29,002,326,911	66,029,044,130	43.92	Baik
2016	30,709,233,356	71,302,466,356	43.07	Baik
2017	38,282,322,400	102,374,322,400	37.39	Cukup
2018	45,131,000,000	101,937,840,823	44.27	Baik
	Rata-Rata		42.40	Baik

Sumber: Data Diolah 2019

Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi yang terendah sebesar 37,39 persen yaitu pada tahun 2017 dan kontribusi tertinggi sebesar 44,33 persen yaitu pada tahun 2014. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi adalah sebesar 42,40 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berkontribusi dengan baik terhadap PAD Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi jika dilihat dari kontribusi setiap jenis pajak daerah maka akan diperoleh kondisi bahwa tingkat kontribusi setiap jenis pajak tersebut masih kurang terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi, namun jika dilihat secara keseluruhan, maka pajak daerah telah berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi. Jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak hotel. Sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari penerimaan pajak air bawah tanah.

Menurut Meilani (2017) Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Pada tahun 2011-2018 Efektivitas pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 104,12 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 88,35 persen. Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah kota Bukittinggi yaitu sebesar 98,16 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas pajak daerah kota bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria efektif.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	17,168,500,000	17,323,683,897	100.90	Sangat Efektif
2012	20,502,492,642	19,848,460,300	96.81	Efektif
2013	24,182,218,901	22,561,089,970	93.30	Efektif
2014	26,982,218,901	27,314,752,524	101.23	Sangat Efektif
2015	27,855,512,078	29,002,326,911	104.12	Sangat Efektif
2016	34,758,804,463	30,709,233,356	88.35	Efektif
2017	37,927,583,059	38,282,322,400	100.94	Sangat Efektif
2018	45,293,035,421	45,131,000,000	99.64	Efektif
Rata-Rata			98.16	Efektif

Sumber: Data Diolah 2019

Pada tahun 2011-2018 penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi yang tidak mencapai target adalah pada tahun 2012,2013,2016 dan 2018. Tidak tercapainya target Penerimaan pajak daerah ini dapat mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun. Hal ini dikarenakan pajak daerah Kota Bukittinggi memiliki Kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi di bandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah yang paling efektif diperoleh oleh Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan. Ketiga jenis pajak ini mampu melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis pajak daerah yang kurang efektif penerimaannya diperoleh oleh Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah.

Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2011	12,951,894,643	41,660,125,540	31.09	Cukup
2012	14,935,146,711	45,262,607,011	33.00	Cukup
2013	16,757,443,119	55,368,533,089	30.27	Cukup
2014	18,043,486,304	61,615,347,589	29.28	Sedang
2015	17,032,759,085	66,029,044,130	25.80	Sedang
2016	21,070,000,000	71,302,466,356	29.55	Sedang
2017	27,329,000,000	102,374,322,400	26.70	Sedang

2018	29,943,000,000	101,937,840,823	29.37	Sedang
Rata-Rata			29.38	Sedang

Sumber: Data Diolah 2019

Pada tahun 2011-2018 kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu sebesar 33,00 persen pada tahun 2012 dan yang terendah pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 25,80 persen. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011-2018 sebesar 29,38 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sedang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pendapatan retribusi daerah terbesar diberikan oleh retribusi jasa usaha, selanjutnya diikuti oleh retribusi jasa umum dan kontribusi terkecil diberikan oleh retribusi perizinan tertentu dengan kriteria sangat kurang. Namun secara keseluruhan, retribusi daerah Kota Bukittinggi tahun 2011-2015 cukup berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Irwandi (Yulman: 2018) faktor yang menyebabkan belum tercapainya target retribusi daerah Kota Bukittinggi dikarenakan masih adanya permasalahan seperti kurangnya jumlah personil pemungut retribusi dan masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

Tabel 8. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2011	16,806,931,722	12,951,894,643	77.06	Kurang Efektif
2012	17,279,641,811	14,935,146,711	86.43	Cukup Efektif
2013	19,020,690,049	16,757,443,119	88.10	Cukup Efektif
2014	20,500,506,821	18,043,486,304	88.01	Cukup Efektif
2015	20,372,528,431	17,032,759,085	83.61	Cukup Efektif
2016	17,991,825,075	21,070,000,000	117.11	Sangat Efektif
2017	19,006,564,009	27,329,000,000	143.79	Sangat Efektif
2018	26,723,908,061	29,943,000,000	112.05	Sangat Efektif
Rata-Rata			99.52	Efektif

Sumber: Data Diolah 2019

Pada tahun 2011-2018 efektivitas retribusi daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 143,79 persen dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 77,06 persen. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah kota Bukittinggi yaitu sebesar 99,52 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah kota bukittinggi berada pada kriteria efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2015) yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa penerimaan retribusi yang paling efektif adalah Retribusi Jasa usaha, selanjutnya diikuti oleh Retribusi Jasa Umum dan retribusi yang tidak efektif penerimaannya selama periode 2011-2015 adalah Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Irwandi (Yulman: 2018) faktor yang menyebabkan belum tercapainya target

retribusi daerah Kota Bukittinggi dikarenakan masih adanya permasalahan seperti kurangnya jumlah personil pemungut retribusi dan masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Upaya pemerintah kota bukittinggi dalam mengoptimalkan retribusi daerah adalah dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam membayar retribusi daerah.

Kontribusi dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Pada tahun 2011-2018 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi yaitu sebesar 7,76 persen pada tahun 2011 dan kontribusi terendah sebesar 4,84 persen pada tahun 2017 dan 2018. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bukittinggi sebesar 6,06 persen. Setiap tahunnya persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selalu kurang dari 10 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bukittinggi berada pada kriteria sangat kurang.

Tabel 9. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2011	3,234,547,000	41,660,125,540	7.76	Sangat Kurang
2012	2,892,000,000	45,262,607,011	6.39	Sangat Kurang
2013	3,692,000,000	55,368,533,089	6.67	Sangat Kurang
2014	3,453,740,700	61,615,347,589	5.61	Sangat Kurang
2015	3,884,306,585	66,029,044,130	5.88	Sangat Kurang
2016	4,636,233,000	71,302,466,356	6.50	Sangat Kurang
2017	4,953,000,000	102,374,322,400	4.84	Sangat Kurang
2018	4,936,000,000	101,937,840,823	4.84	Sangat Kurang
	Rata-Rata		6.06	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2019

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman Funangi (2018) yang menunjukkan rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 5,56 persen dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan daerah ada yang tidak memberikan pemasukan pada beberapa tahun. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bukittinggi bersumber dari kontribusi beberapa perusahaan daerah antara lain PDAM Kota Bukittinggi, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan BPR Jam Gadang. Langkah dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yaitu strategi pengusahaan, strategi penumbuhan dan strategi penyehatan perusahaan. Menurut Herry (2005:45) langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan oleh kepala daerah terhadap perusahaan daerah antara lain:

- 1) Pembinaan perusahaan daerah yaitu dengan melakukan deregulasi di bidang peraturan antara lain dengan memberi kewenangan yang lebih luas kepada direksi perusahaan daerah dalam mengembangkan usahanya.
- 2) Kerja sama perusahaan dengan pihak ketiga dalam upaya memanfaatkan aset perusahaan daerah agar lebih berdaya guna.
- 3) Meningkatkan kemampuan permodalan melalui bantuan pinjaman dari dalam dan luar negeri.
- 4) Melepas aset yang tidak efisien dan tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tabel 10. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2011	3,038,188,054	3,234,547,000	106.46	Sangat Efektif
2012	3,248,073,956	2,892,000,000	89.04	Cukup Efektif
2013	3,234,547,000	3,692,000,000	114.14	Sangat Efektif
2014	3,452,740,700	3,453,740,700	100.03	Sangat Efektif
2015	4,172,921,853	3,884,306,585	93.08	Efektif
2016	4,322,456,367	4,636,233,000	107.26	Sangat Efektif
2017	4,810,029,445	4,953,000,000	102.97	Sangat Efektif
2018	5,352,600,766	4,936,000,000	92.22	Efektif
Rata-Rata			100.65	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2019

Pada tahun 2011-2018 efektivitas penerimaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi diperoleh pada tahun 2013 yaitu sebesar 114,14 persen dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 89,04 persen. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bukittinggi bersumber dari kontribusi beberapa perusahaan daerah antara lain PDAM Kota Bukittinggi, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan BPR Jam Gadang. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota Bukittinggi yaitu sebesar 100,65 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kota bukittinggi berada pada kriteria sangat efektif.

Kontribusi dan Efektivitas PAD Lainnya Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tabel 11. Kontribusi PAD Lainnya yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Pad Lainnya Yang Sah	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2011	8,150,000,000	41,660,125,540	19.56	Kurang
2012	7,587,000,000	45,262,607,011	16.76	Kurang
2013	12,358,000,000	55,368,533,089	22.32	Sedang
2014	12,803,368,061	61,615,347,589	20.78	Sedang
2015	16,109,651,549	66,029,044,130	24.40	Sedang
2016	14,887,000,000	71,302,466,356	20.88	Sedang
2017	31,810,000,000	102,374,322,400	31.07	Cukup
2018	21,927,000,000	101,937,840,823	21.51	Sedang
Rata-Rata			22.16	Sedang

Sumber: Data Diolah 2019

Kontribusi PAD lainnya yang sah tertinggi pada tahun 2017 sebesar 31,07 dan persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 16,76 persen dengan kriteria kurang. Secara keseluruhan kontribusi PAD lainnya yang sah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011-2018 memiliki rata-rata 22,16 persen dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dengan judul analisis pertumbuhan dan kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kota bukittinggi tahun 2011-2015 rata-rata kontribusi penerimaan PAD lainnya yang sah kota bukittinggi adalah sebesar 21 persen. Hal ini dikarenakan penerimaan PAD lainnya tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Naiknya kontribusi PAD lainnya yang sah terhadap PAD kota bukittinggi disebabkan oleh beberapa komponen PAD lainnya yang sah yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito dan lain-lain.

Tabel 12. Efektivitas PAD Lainnya Yang Sah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018.

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2011	8,010,318,916	8,150,000,000	101.74	Sangat Efektif
2012	8,280,000,000	7,587,000,000	91.63	Efektif
2013	8,208,900,000	12,358,000,000	150.54	Sangat Efektif
2014	9,642,831,500	12,803,368,061	132.78	Sangat Efektif
2015	10,688,703,750	16,109,651,549	150.72	Sangat Efektif
2016	18,087,916,759	14,887,000,000	82.30	Cukup Efektif
2017	20,309,112,937	31,810,000,000	156.63	Sangat Efektif
2018	22,803,072,005	21,927,000,000	96.16	Efektif
Rata-Rata			120.31	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2019

Pada tahun 2011-2018 efektivitas penerimaan PAD lainnya yang sah tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 156,63 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 82,30. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas PAD lainnya yang sah kota Bukittinggi yaitu sebesar 120,31 persen yang berarti bahwa tingkat efektivitas PAD lainnya yang sah kota bukittinggi berada pada kriteria sangat efektif. Penerimaan PAD lainnya yang sah Kota Bukittinggi dari tahun 2011-2018 sudah sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan PAD lainnya yang sah cenderung mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah kota bukittinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria baik. Efektivitas pajak daerah Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria Efektif. 2) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sedang. Efektivitas retribusi daerah Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria Efektif. 3) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sangat kurang. Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sangat Efektif. 4) Kontribusi PAD lainnya yang sah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sedang. Efektivitas PAD lainnya yang sah Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 berada pada kriteria sangat Efektif. 5) Tingkat kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 yang paling tinggi berasal dari penerimaan pajak daerah dan yang terendah adalah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 6) Tingkat efektivitas Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2011-2018 yang paling tinggi adalah berasal dari penerimaan PAD lainnya yang sah dan yang terendah berasal dari penerimaan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2013". Katalog BPS 1102001.138 diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2014". Katalog BPS 1102001.1375diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.05 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2015". Katalog BPS 1102001.1375diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.08 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2016". Katalog BPS 1102001 diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.12 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2017". Katalog BPS 1102001.1375 diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.16 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2018". Katalog BPS 1102001.1375 diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.30 WIB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Bukittinggi Dalam Angka 2019". Katalog BPS 1102001.1375 diakses dari <https://bukittinggikota.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 agustus 2019 pada jam 19.35 WIB.
- Funangi, Usman. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat YKPN
- Herry, Achmad. 2005. *Pilkada Langsung 9 Kunci Sukses Tim Sukses*. Edisi Pertama. Galang Press. Yogyakarta.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.
- Meilani, Hilma. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Carunia Mulya Firdausy, editor. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pemerintah Kota Bukittinggi, 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- Pemerintah Kota Bukittinggi, 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017.
- Putri, Dela Monicha. 2017. *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Di Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ramadhani, Rahmatullaili. 2016. *Analisis efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota bukittinggi tahun 2011-2015*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. Padang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- Yulman. 2018. *Maksimalkan Penerimaan PAD, Tim Intensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Lakukan Rapat Evaluasi*. Bukittinggi.go.id (diakses pada 6 November 2019)